



LEMHANNAS RI

NEWSLETTER

TIADA KEBENARAN YANG MENDUA

EDISI X 20 MEI 2010



DISKUSI PANEL RESTORASI ASEAN

Pada hari Rabu, 14 April 2010, di Gedung Asta Gatra Lt. III Barat dilaksanakan diskusi panel yang bertema "**Peningkatan Peran Indonesia dalam Restorasi ASEAN**". Diskusi panel tersebut dihadiri oleh Deputy Kerjasama Ekonomi Sekretariat Jenderal ASEAN Mr. Sundram Pushpanatan. Pada acara tersebut, Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, S.H. menyatakan bahwa tema yang diangkat dalam diskusi ini merupakan aspek yang sangat strategis untuk dibahas guna mencapai kesamaan persepsi dalam menghadapi tantangan-tantangan masa depan yang akan dihadapi masyarakat ASEAN.

Perubahan dunia sangat terkait erat dengan munculnya berbagai masalah global seperti krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan dan pemanasan global. Salah satu fenomena logis dari arus globalisasi yang semakin cepat adalah menguatnya regionalisasi. Hal ini telah terjadi di wilayah ASEAN sebagaimana diindikasikan dengan kesepakatan final (*concluding agreement*) dan pelaksanaan dari Piagam ASEAN menuju ASEAN Satu Visi, Satu Identitas dan Satu Komunitas.

Kecenderungan mendasar dari perekonomian dunia saat ini memperlihatkan bahwa sedang terjadi proses penyeimbangan ekonomi dunia menuju wilayah Asia. Proses ini akan berimplikasi terhadap Timur Tengah, pergeseran kekayaan/kemakmuran menuju negara-negara Asia yang akan sangat mempengaruhi pasar keuangan dunia. Untuk itu Indonesia harus memandang hal ini sebagai suatu peluang untuk meningkatkan perannya, khususnya dalam upaya merestorasi ASEAN dalam rangka memperkokoh ketahanan dan stabilitas regional.

Memasuki abad ke-21 telah terjadi perubahan dramatis terhadap sistem politik dan sistem ekonomi dunia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya kita membentuk tatanan dunia yang baru. Mengingat dunia saat ini bergerak dari *Pax Americana* menuju sebuah tatanan baru yang disebut *Pax Consortis*, yang berarti bahwa tatanan dunia akan menjadi suatu fungsi dari negara-negara atau wilayah-wilayah utama untuk bekerja secara



Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi SH, menerima Deputy Kerjasama Ekonomi Sekretariat Jenderal ASEAN Mr. Sundram Pushpanatan di Ruang Kerja Gubernur.

bersama-sama. Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community / AEC*) yang akan diberlakukan secara efektif pada tahun 2015 merupakan komitmen strategis di antara negara-negara ASEAN dalam menghadapi perubahan *landscape* dunia.

Istilah baru *Chindonesia* diperkenalkan oleh Nicholas Cashmore yang merujuk kepada segitiga kekuatan global Asia baru yang terdiri atas China, India dan Indonesia. Hal ini dikarenakan ketiga negara ini telah mencapai pertumbuhan ekonomi positif ketika negara-negara lainnya masih dalam siklus pertumbuhan negatif.

Secara geografis Indonesia memiliki wilayah yang paling luas dan memiliki posisi penting serta mempunyai banyak sumber daya alam. Dengan demikian, berdasarkan kondisi alamnya, Indonesia memiliki potensi ekonomi terbesar di wilayah ASEAN yang tentunya sangat strategis untuk meningkatkan perannya guna mendukung restorasi ASEAN dalam rangka memperkokoh ketahanan regional ASEAN.

Diharapkan dari diskusi panel dapat dihasilkan pemikiran-pemikiran pokok yang dapat membawa pada pendekatan dan strategi restorasi ASEAN guna menjamin keberhasilan pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN (AEC) pada tahun 2015 berdasarkan piagam ASEAN untuk melayani kepentingan dari semua negara anggota ASEAN.

DAFTAR ISI

1. Diskusi Panel Restorasi ASEAN.....	1
2. Pengkajian Percepatan Pembangunan Daerah Papua.....	2
3. Konsistensi Penegakan Supremasi Hukum untuk Melindungi Semua Simbol dan Pejabat Negara.....	3
4. Disparitas Pidana dan Hak Asasi Manusia.....	4
5. Donor Darah dalam rangka Memperingati HUT ke-45 Lemhannas RI.....	5
6. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Lemhannas RI.....	6
7. Peningkatan Jaringan Transportasi Laut Terintegrasi	7
8. Kunjungan Peserta Forum Konsolidasi Pimpinan Daerah ke China.....	8
9. Upacara Bendera Bulan April 2010.....	9
10. Kunjungan Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ke Lemhannas RI.....	10
11. Rombongan Mahasiswa FISIP UNHAS di Lemhannas RI.....	11
12. Rapat Koperasi Primer Lemhannas RI.....	12



Suasana Diskusi Panel yang dihadiri oleh Deputy Kerjasama Ekonomi Sekretariat Jenderal ASEAN Mr. Sundram Pushpanatan

PENGAJIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

Round Table Discussion (RTD) yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2010 di Gedung Asta Gatra Lt. III Barat mengkaji tentang Percepatan Pembangunan Daerah Papua untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dalam Kerangka Ketahanan Nasional dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara filosofis, UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua adalah sebagai langkah strategis untuk menyejajarkan kesejahteraan dan keamanan Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia sebagai unsur yang terpenting dalam konsep kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional.

Kebijakan otonomi khusus yang diterapkan di Papua, merupakan refleksi dari pendekatan desentralisasi yang "asimetris", artinya kebijakan desentralisasi yang ditetapkan di Papua tidak sama dan tidak sebangun dengan desentralisasi di provinsi lainnya di Indonesia. Pendekatan *asimetris-politis* dilakukan untuk mengakomodasikan perbedaan yang tajam antara Papua dengan daerah lainnya dan memiliki landasan hukum yang kuat dalam UUD NRI Tahun 1945.

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan Papua ini dapat dilihat antara lain dari alokasi anggaran. Jika pada tahun 2009 alokasi dana APBN provinsi Papua sebesar Rp. 19,058 triliun maka pada tahun 2010 alokasi dana Papua mencapai Rp. 21,89 triliun atau mengalami kenaikan sekitar Rp. 2,8 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Papua memiliki arti penting dalam pembangunan NKRI.

Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, S.H., dalam *keynote speech*-nya menyampaikan bahwa stimulus tersebut di atas merupakan keinginan pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Menghadapi realita Papua saat ini, sangat diperlukan strategi rasional dan penuh kesungguhan, terhadap percepatan pembangunan Papua. Pola pembangunan partisipatif dianggap sesuai untuk mempercepat pembangunan karena melibatkan berbagai pelaku yang terkait dan berkepentingan sehingga seluruh sumber daya dapat digerakkan secara optimal.

Dihadapkan pada kompleksitasnya permasalahan Papua maka pilihan pendekatan sentralistik dan regionalistik menjadi alternatif pendekatan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan. Pendekatan sentralistik, secara luas melalui pembangunan prasarana dan sarana akan memacu pengembangan pemukiman termasuk peningkatan migrasi sehingga tercapai *economies of*



Round Table Discussion dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi S.H. dan dihadiri oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH di Gedung Asta Gatra Lt. III Barat

scale yang tinggi sebagai syarat pertumbuhan ekonomi berskala besar. Sedangkan pendekatan regionalistik melalui pola perwilayahan yaitu pengembangan kawasan dapat mendorong tercapainya efektivitas kebijakan yang bertumpu kepada penguatan potensi ekonomi dan sosial budaya.

Kebutuhan terhadap percepatan pembangunan daerah Papua menjadi fokus perhatian sebagai salah satu barometer keberhasilan pembangunan nasional dikaitkan dengan peningkatan kepercayaan dunia terhadap perkembangan demokrasi Indonesia.

Kunci keberhasilan pembangunan Papua adalah komitmen bersama yang kuat, nyata dan berkesinambungan dan pentingnya *mutual trust* serta terbangunnya hubungan sistemik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan Papua yang mandiri, maju dan sejahtera dalam bingkai NKRI.

Dalam RPJMN 2010–2014 (Perpres No. 5 Tahun 2010) harapan untuk membangun Papua secara bermartabat semakin terbuka atas dasar misi RPJMN yaitu "**Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan**" dengan memperkuat "*triple tract strategy*" serta pembangunan inklusif dan berkeadilan.

Dengan pelbagai rencana pembangunan yang menekankan prioritas nasional yang mencakup bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan dan kemandirian energi, ketahanan pangan, reformasi birokrasi, dan lain-lain, yang juga mencakup Papua, daya saing dan ketahanan wilayah Papua akan semakin baik sebagai sub-sistem ketahanan nasional.

KONSISTENSI PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM UNTUK MELINDUNGI SEMUA SIMBOL DAN PEJABAT NEGARA

Pada hari Kamis, 8 April 2010, dilaksanakan *Round Table Discussion* (RTD) di Ruang Rapat Nusantara I, Gedung Tri Gatra Lemhannas RI tentang "**Konsistensi Penegakan Supremasi Hukum untuk Melindungi Semua Simbol dan Pejabat Negara guna Meningkatkan Kewibawaan Lembaga-lembaga Negara**".

Dalam RTD tersebut Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, S.H., menyampaikan bahwa upaya penegakan supremasi hukum saat ini dihadapkan pada kendala kuatnya tekanan publik (*public pressure*) yang terlalu menonjolkan hak-hak sipil atau individual disertai dengan *political interest* sementara elite politik dengan perspektif jangka pendek yang emosional (*quick win mission*) dan memanfaatkan kelemahan hukum.

Keadaan tersebut di atas berimplikasi terhadap kepastian dan keadilan hukum yang menimbulkan kegamangan serta sikap keragu-raguan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang mendasarkan diri pada wawasan jangka panjang.

Dalam rangka menjaga terlaksananya komunikasi antar komponen bangsa, perlu dipelihara keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara, karena bila terjadi penyumbatan komunikasi antara kepentingan individu, masyarakat dan negara dapat mengakibatkan ketidakpercayaan (*people distrust*) terhadap simbol dan pejabat negara sebagaimana yang diekspresikan melalui teatrikal (*happening art*) dan penggunaan secara simbolik (pawai *alegoris*) dalam aksi unjuk rasa yang mengabaikan etika, budaya demokrasi, nilai-nilai sosial-religius dan jati diri bangsa yang beradab dan bermartabat.

Negara menjamin kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat dalam berunjuk rasa. Hal ini menggambarkan negara demokrasi dan harus mendapat perlindungan hukum. Akan tetapi kebebasan itu harus tetap dalam koridor hukum positif, bahkan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat seperti tata nilai sosial budaya, kepribadian bangsa, nilai agama maupun etika.

Untuk itu, diperlukan konsistensi penegakan supremasi hukum dalam penanganan aksi unjuk rasa dengan cara mendorong akselerasi kemajuan kualitas kehidupan demokrasi yang sejalan dengan penguatan *civil society* dan *good governance* dengan tidak terlepas dari moralitas bangsa dalam bentuk keadilan dan kewajiban mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyikapi berbagai fenomena penegakan supremasi hukum harus berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan (*just*), kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*), dan kepastian hukum (*legal certainty*) serta menjunjung tinggi hak

asasi manusia (HAM), seperti diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 UUD Negara RI Tahun 1945. Konsekuensinya aturan hukum harus ditegakkan secara adil (*impartiality*) dan memberikan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara.

Terkait dengan perlindungan simbol dan pejabat negara menjadi tugas penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepentingan/benda hukum atau nilai dasar yang dikategorikan sebagai delik penghinaan yaitu "martabat/derajat kemanusiaan" yang merupakan salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi. Dalam hal ini yang dimaksud penghinaan pada hakikatnya adalah perbuatan yang sangat tercela, dilihat dari berbagai aspek antara lain: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/ kemanusiaan, karena "menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan" itu secara teoritik dipandang sebagai "*rechtsdelict*"; "*intrinsically wrong*", dan dilarang di berbagai negara.

Gubernur Lemhannas RI juga mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganannya tidak hanya melalui pendekatan *represif* (*hard power*) namun juga melalui pendekatan *preemptive*, *preventif*, *persuasif* (*soft power*) dengan program pendidikan hukum dalam rangka membangun perilaku masyarakat sadar hukum, tertib hukum, termasuk melakukan pendekatan *solutif* dengan mengembangkan upaya mediasi dan rekonsiliasi sebagai alternatif untuk menyelesaikan kasus hukum, sehingga kepastian dan keadilan hukum dalam proses menjaga konsistensi penegakan hukum secara akuntabel dan transparan dapat terwujud, guna menjaga kehormatan simbol dan pejabat negara agar kewibawaan lembaga-lembaga negara tetap terjaga.



Suasana RTD Sosbud yang di laksanakan oleh Direktorat Pengkajian Politik Deputy Pengkajian Strategik Lemhannas RI

Disparitas Pidana dan Hak Asasi Manusia

Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Muladi, S.H. memberikan kuliah umum kepada 30 (tigapuluh) peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Angkatan I Kementerian Hukum dan HAM, pada 23 April 2010, di Ruang Rapat Nusantara I Gedung Trigatra, Lemhannas RI. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan pelatihan terkait dengan diskriminasi hukum disparitas pidana yaitu penerapan sanksi pidana yang berbeda-beda cenderung tidak adil (*unequal treatment of sentencing*) tanpa landasan hukum, alasan rasional (*unwarranted*), dan bersifat diskriminatif, atau atas dasar sebab yang tidak jelas dan tidak berkaitan dengan kasus yang bersangkutan (hal-hal yang memberatkan dan meringankan), baik terhadap tindak pidana yang sama.

Pada Pasal 340 Pembunuhan Berencana yang terdiri atas tiga pilihan, yaitu pidana mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara; atau seperti dalam kasus pencurian dengan rentang waktu antara 1-5 tahun, maupun tindak pidana yang kurang lebih sama ancaman pidananya; atau untuk kasus pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, karena kealpaannya menyebabkan kematian yakni lima tahun.

Permasalahan dalam disparitas pidana dalam hal ini bukan tuntutan adanya paritas pidana (*parity of sentencing*), tetapi penjatuhan pidana yang rasional atau beralasan (*reasonable sentencing*) atas dasar alasan-alasan yang obyektif. Penjatuhan pidana yang rasional dalam demokrasi adalah bentuk promosi serta perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai bentuk prasyarat untuk hidup bebas bermartabat (*freedom to live in dignity*) di samping bebas dari kemiskinan (*freedom from want*) dan bebas dari ketakutan (*freedom from fear*). Perlu diperhatikan, bahwa kebebasan tersebut terdapat kelompok-kelompok marginal (*vulnerable group*) yang mengalami perasaan ketidakadilan (*feeling of injustice*); keadilan yang merupakan kreasi manusia (*human creation*) pada dasarnya mengandung unsur-unsur: *equality before the law*; *non-discrimination*; *right to a fair trial*; kejujuran dan kewajaran (*fairness*); kerukunan, keserasian, dan keselarasan (*mutual agreement*); kepastian (*certainty*); dan sikap tidak memihak (*impartiality*).

Kelompok terpidana yang merasa menjadi korban disparitas pidana merupakan salah satu kelompok marginal



Gubernur Lemhannas RI Photo bersama dengan peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkatan I Kementerian Hukum dan HAM di Ruang Nusantara

sebagai akibat *miscarriage of justice* atau malpraktek hukum. Masalah pidana dan tindakan (*punishment and treatment*) merupakan salah satu persolan utama/masalah pokok dalam hukum pidana, di samping perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*unlawful act*) dan masalah pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

Disparitas pidana, selain dapat menghambat proses resosialisasi terpidana yang merasa menjadi korban ketidakadilan (*miscarriage of justice or malpractice of sentencing*), juga secara tidak langsung dapat menimbulkan sikap tidak puas atau keresahan (*prisoners unrest*) yang antara lain menjadi penyebab kekacauan atau *prison riot* di lembaga pemsayarakatan, di samping bertentangan atau bahkan penyalahgunaan dengan salah satu prinsip supremasi hukum, yakni kekuasaan kehakiman yang merdeka (*judicial independence*) dan cara penerapan hukum yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip *equality, justice, and certainty*.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, sumber terjadinya disparitas pidana antara lain yaitu Pemahaman tentang perkembangan filosofi aliran dalam hukum pidana dari '*daadstrafrecht*' aliran klasik yang menganut '*definite sentence*', ke arah '*daderstrafrecht*' (aliran modern) yang mengutamakan individualisasi pidana '*indeterminate sentence*' (ketentuan minimum-maksimum) atas dasar perkembangan pengetahuan

perilaku; Berkembangnya '*alternative sanctions*' (bukan *alternative goals*) untuk menghindari pidana kemerdekaan jangka pendek yang merusak; berkembangnya perhatian terhadap korban kejahatan; prinsip kebebasan hakim (*freedom of the judiciary*); perkembangan filosofi tentang tujuan ppidanaan apakah bersifat absolut, relatif, atau gabungan; tiadanya pedoman pemberian pidana (*sentencing guidelines*) yang jelas; berkembangnya sanksi pidana yang menyimpang dari Buku I KUHP; pengaturan khusus tentang asas subsidiaritas atau prinsip *ultimatum remedium* dalam *Mala Prohibita* atau *Rechtsdelict* (bukan *mala per se/wetsdelict*); pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal responsibility*); sistem kumulatif atau alternatif kumulatif dalam ppidanaan di luar KUHP; pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi; *Overcriminalization*; Diskresi yang luas dari hakim untuk memilih jenis, berat ringannya dan cara ppidanaan dilakukan atas dasar kekuasaan kehakiman yang merdeka dan prinsip "*indeterminate sentence*" (hakim menerapkan pidana secara individual bukan hanya atas dasar beratnya kejahatan, tetapi juga atas dasar karakter khas pelaku dan keadaan lain, termasuk kemungkinan potensial dari pelaku untuk direhabilitasi. Di sini kewenangan dari pejabat penjara untuk membebaskan terpidana atas dasar evaluasi perilakunya di lembaga pemsayarakatan.

Untuk itu, yang dikehendaki dari pemidanaan bukan *parity of sentencing*, tetapi *rational sentencing*, atas dasar pedoman pemidanaan (*presumptive sentencing guidelines* yang jelas), yaitu perbedaan pidana berdasarkan penghukuman yang rasional dengan mempertimbangkan karakter khas pelaku dan keadaan-keadaan lain. Pemberian pidana juga dirumuskan dalam masing-masing pidana, misalnya hal-hal apakah yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana mati dan pidana

bersyarat. Usaha untuk mengurangi disparitas bisa juga dilakukan dengan mengatur dan menerapkan pidana minimum khusus. Selain itu, aparat Lembaga Pemasyarakatan atas dasar asas "*indeterminate sentence*" juga bisa menetralsisir disparitas dalam hal ini adalah kesamaan filosofi dan pemahaman tentang kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*) antara pembuat undang-undang dengan para penegak hukum yang harus menerapkan undang-undang tersebut. Di beberapa negara ada usaha untuk

melakukan komputerisasi pemidanaan (*computerized sentencing*) untuk menciptakan standardisasi jangka waktu pemidanaan, setelah ada program yang jelas tentang indikatornya atau parameternya (*computerized sentencing software*); hal ini untuk menghindari penerapan yang eksekusif dari kebebasan hakim dan menghindari korupsi, serta mungkin dari kritik terkait dengan hilangnya faktor kemanusiaan dalam pemidanaan.

DONOR DARAH DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT KE-45 LEMHANNAS RI

Sekretaris Utama (Sektama) Lemhannas RI DR. Ardi Partadinata membacakan sambutan Gubernur Lemhannas RI pada acara Donor Darah Lemhannas RI tanggal 10 Mei 2010, sebagai bagian dari rangkaian acara peringatan ulang tahun Lemhannas RI ke-45 yang akan diselenggarakan pada 20 Mei 2010. Pada kesempatan tersebut Sektama menyampaikan Gubernur menyambut baik kegiatan ini dan mengajak segenap warga Lemhannas RI untuk ikut berperan serta dalam kegiatan donor darah tersebut dan juga menyambut baik atas prakarsa sosial oleh panitia dalam upaya ikut serta memupuk rasa kebersamaan dan memantapkan rasa kemanusiaan serta peduli terhadap nasib sesama umat manusia, dilandasi satu komitmen memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan sosial donor darah tersebut adalah perwujudan dan sikap peduli terhadap sesama yang perlu terus dibangun, dan siapapun dapat berpartisipasi untuk ikut mendonorkan darahnya, karena pada hakikatnya kegiatan bantuan kemanusiaan apapun bentuknya, merupakan kewajiban setiap insan masyarakat. Kegiatan donor darah ini diselenggarakan di Gedung Dwi Warna Lemhannas RI, dan diikuti oleh seluruh warga Lemhannas RI yang memenuhi syarat kesehatan.



Ibu Nani Muladi memberi sambutan selaku Ketua Panitia Kegiatan Donor Darah dalam rangka memperingati Ulang Tahun Lemhannas RI ke-45



Sektama Lemhannas RI DR. Ardi Partadinata membaca sambutan mewakili Gubernur Lemhannas RI pada acara Donor Darah



Disaksikan oleh Ibu Nani Muladi seorang donatur sedang mendonorkan darahnya penuh keikhlasan

PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI LEMHANNAS RI

Rabu, 7 April 2010, Gubernur Lemhannas RI Prof DR. Muladi, S.H, dalam sambutannya pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa merupakan momentum yang sangat baik bagi kita untuk menggali makna dan hikmah yang terkandung di dalam peringatan tersebut dan sekaligus mengajak kita merenungkan dan mengintrospeksi sejauh mana telah melaksanakan serta menerapkan, dan meneladani Sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Rasulullah dengan kepribadiannya yang sempurna, telah memberikan suri tauladan kepada kita untuk memiliki semangat pantang menyerah dalam upaya menegakkan *amarna'ruf nahimunkar*, yaitu mengajak kita semua untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Upaya untuk menegakkan hal-hal yang baik dan memerangi hal-hal yang buruk, akan selalu kita hadapi dan kita lakukan dalam mengarungi kehidupan ini. Ketauladanan Rasulullah tersebut, perlu dipadukan dengan pedoman dasar yang kita miliki, baik sebagai umat, aparat dan abdi negara maupun sebagai anggota masyarakat sehingga sikap, tutur kata, dan tindakan kita, senantiasa sesuai dengan kepribadian dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Karena dengan mengenal Nabi Muhammad SAW secara utuh akan menjadi peluang utama untuk mendalami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam secara utuh pula. Keinginan dan harapan tersebut sesuai dengan tema peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1431 Hijriah kali ini, yaitu: **"Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita jadikan**



Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH memberikan sambutan pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI

diri Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa". Aktualisasi tema tersebut menuntut komitmen yang kuat dan ketauladanan yang konsisten dari kita semua sehingga kehadiran dan keberadaan kita, akan senantiasa mampu memberikan kesejukan, ketenangan, dan ketentraman baik di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Bangsa Indonesia membutuhkan semangat persatuan dan kesatuan untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa dan negara yang sedang dihadapi. Sejarah telah mencatat, bahwa konflik yang terjadi sepanjang perjalanan bangsa ini, lebih disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan pribadi sehingga sampai hati membenturkan rakyatnya sendiri. Bangsa kita ini, memang masih perlu banyak belajar tentang etika dalam menghargai dan menghormati terhadap sesama, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan.

Melalui peringatan maulid Nabi Muhammad SAW kita berharap agar Allah SWT membimbing kita semua untuk mampu melakukan kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan lembaga serta bagi bangsa dan negara, sebagaimana yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai Penceramah pada kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, adalah KH. Asep Mubarak.



Suasana saat acara Maulid Nabi Muhammad SAW berlangsung di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI

PENINGKATAN JARINGAN TRANSPORTASI LAUT TERINTEGRASI

Jaringan transportasi laut memainkan peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia baik di pusat maupun daerah. Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas lautnya mencapai 5,8 juta km², atau mendekati 70% dari luas keseluruhan Indonesia. Melihat besarnya potensi kelautan, namun belum tingginya pemanfaatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat, Pengkajian Pertahanan dan Keamanan mengkaji mengenai potensi laut dan pentingnya yang terintegrasi peningkatan jaringan transportasi. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. saat membuka *Round Table Discussion* tentang **"Peningkatan Jaringan Transportasi Laut yang Terintegrasi untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah dalam Rangka Ketahanan Nasional"** pada 22 April 2010.

Indonesia bisa berharap besar terhadap potensi pasar dari laut nusantara. Pada tahun 2005, lebih dari 98,5% volume kegiatan ekspor-impor dengan transaksi senilai US \$ 136,9 miliar diangkut dengan menggunakan transportasi laut. Berdasarkan data Ditjen Hubungan Laut Kementerian Perhubungan, prosentase pangsa pasar angkutan laut dalam negeri yang dilaksanakan oleh Armada Nasional

dan Asing sejak tahun 2005 sampai tahun 2009 meningkat. Pada tahun 2005, Armada Nasional meningkat dari 54% menjadi 86,7% di tahun 2009, saat bersamaan armada asing menurun dari 46% menjadi 14,3%. Begitu juga perbandingan prosentase angkutan laut berbendera Indonesia dan Armada Asing, dari sebelumnya sebesar 3,5% untuk Armada Indonesia dan 96,5% Armada Asing, menjadi 9% armada Indonesia dan 91% Armada Asing. Perkembangan berarti juga terlihat dari meningkatnya pelayanan trayek PT. Peln pada tahun 2004 sampai tahun 2008, yaitu pada tahun 2004 dari 47 trayek, menjadi 56 trayek tahun 2008.

Di balik besarnya perkembangan dan potensi angkutan kelautan Indonesia, di beberapa jalur laut padat seperti Selat Malaka rawan terhadap perompakan dan tindak kriminal. Angkutan laut perintis tidak mengalami peningkatan yang berarti dalam pengangkutan barang, sebesar 120.400 MT pada tahun 2004, menjadi sebesar 136.309 MT pada tahun 2008. Hal ini merefleksikan belum adanya peningkatan kiriman barang dan aktivitas yang berarti ke daerah terpencil dan terluar NKRI dalam pengamanan wilayah perbatasan dan dukungan logistik. Potensi pasar ekspor-impor yang besar dari angkutan pelayaran nasional belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh armada pelayaran nasional. Untuk mengantisipasi hal tersebut, selama 2004-2009, pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage (*Mortgage Law and Maritime Lines 1993*) UU No. 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran yang beserta peraturan pemerintah sebagai turunnya yang harus dituntaskan pada tahun 2009.



Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. yang didampingi Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb membuka RTD bidang Ekonomi di Ruang Nusantara I Lemhannas RI

Jaringan transportasi laut memiliki keterkaitan dengan berbagai sistem jaringan transportasi khususnya jaringan transportasi darat dan kereta api, terintegrasinya jaringan transportasi multi moda perlu dicermati sejak dini untuk mencapai suatu kesatuan sistem yang efektif dan efisien menjadi suatu jaringan transportasi *inter moda*.

Pemerintah diharapkan membuat rencana jangka panjang tentang peran, fungsi, dan keseimbangan interaksi antar pulau dan internasional, penerapan jaringan dan fungsi pelabuhan, pembangunan angkutan laut antar pulau, tatanan kepelabuhan nasional. Kerekatan antar pulau harus dijalin untuk meningkatkan dan melancarkan perekonomian, distribusi kebutuhan konsumsi hidup masyarakat dan transportasi antar wilayah. Keterbatasan peran nasional oleh kualitas keberpihakan regulasi dan investasi, kendala teknologi, keleluasaan subsidi dari penganggaran negara akibat ketergantungan pinjaman *World Bank* merupakan kondisi yang harus dipahami oleh penentu kebijakan pemerintahan dalam pengelolaan jaringan transportasi laut. Diharapkan, dengan terintegrasinya jaringan transportasi laut Indonesia dapat mendukung pengembangan ekonomi Indonesia.



Suasana RTD Dejian bidang ekonomi "Peningkatan Jaringan Transportasi Laut yang Terintegrasi untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah dalam Rangka Ketahanan Nasional".

Kunjungan Peserta Forum Konsolidasi ke China

Sebanyak 36 (tigapuluh enam) peserta Forum Konsolidasi (Forkon) Pimpinan Daerah Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD Kabupaten/ Kota Angkatan ke-III Lemhannas RI mengadakan kunjungan ke China pada tanggal 15 April sampai dengan 21 April 2010 dengan didampingi oleh Brigjen TNI Kusworo, Brigjen TNI Paryaman Manurung, dan Kol. Kes. Drs. T.E. Hardjanto. Kegiatan ini pertamakalinya diselenggarakan dan merupakan bagian dari pelaksanaan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) peserta Forkon Pimpinan Pemerintah Daerah Angkatan III tahun 2010 Lemhannas RI.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, peserta mendapat penjelasan berbagai hal penting dari Duta Besar RI di Beijing dan Konsul jenderal RI di Hongkong, sekaligus para peserta mendapat kesempatan berdiskusi tentang ketahanan nasional Republik Rakyat China di bidang



Penyerahan plaquet dan leaflet kepada Duta Besar RI untuk Republik Rakyat China, (Bp. Imran Cotan) oleh Karo Humas Settama Lemhannas RI, Brigjen TNI Kusworo di Kedutaan Besar RI untuk RRC dan Mongolia di Beijing.

geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya di negara yang

berhasil meningkatkan kemampuan perekonomiannya tersebut secara signifikan. Acara lainnya adalah mengunjungi berbagai tempat penting yang berkaitan dengan upaya untuk melakukan studi banding pada bidang "Peningkatan Keunggulan Kompetitif ekonomi dan pariwisata di daerah". Sebagai tambahan pengetahuan untuk prospek pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, peserta meninjau proyek-proyek strategis sektor ekonomi dan pariwisata di China dan Hongkong.

Program SSLN telah memberikan masukan yang penting dan bermanfaat karena para peserta Forkon bisa mendapatkan informasi secara langsung dari pejabat-pejabat dari Negara China dan Hongkong sebagai bahan studi banding dalam menambah wawasan guna meningkatkan ketahanan nasional Indonesia.



Photo bersama peserta Forum Konsolidasi saat berkunjung ke The Great Wall-China

Upacara Bendera Bulan April 2010

Upacara bendera bulan April yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2010 merupakan momen yang sangat penting, disamping untuk memupuk rasa kebersamaan, disiplin dan peningkatan soliditas, juga merupakan wahana untuk menyampaikan berbagai informasi tentang lembaga, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kali ini bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb.

Pada kesempatan upacara bendera tersebut ada beberapa hal yang disampaikan kepada seluruh peserta upacara diantaranya tentang kinerja lembaga yang menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Hal tersebut terbukti, sesuai surat menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor: b/1301/m.pan/04/2009 tanggal 13 April 2009 tentang kebijakan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2009, telah mengevaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Lemhannas RI. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah pusat dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan

yang berorientasi kepada hasil atau *result-oriented government*.

Lemhannas RI mendapat predikat penilaian cukup baik pada **urutan ke-15 dari 74 instansi pemerintah** atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (**Lakip**) tahun 2009, sedangkan penilaian pada tahun 2008 yang lalu Lemhannas RI mendapat **urutan ke-70 dari 74 instansi pemerintah** yang dinilai. Karena itu, Pimpinan sangat mengapresiasi terhadap peningkatan kinerja segenap warga Lemhannas yang telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti tersebut.

Dalam kaitan tersebut, dan untuk meningkatkan profesionalitas segenap warga Lemhannas, maka Lemhannas RI merasa perlu untuk melaksanakan sarasehan yang akan diprakarsai oleh Inspektorat Lemhannas RI dengan tema "**Pemantapan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja dalam rangka Reformasi dan Revitalisasi Lemhannas RI**", dengan sub tema yaitu: **pertama**, "**Pemantapan Akuntabilitas Keuangan melalui Pengendalian Internal yang Efektif**" dan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2010; **kedua**, "**Percepatan Reformasi Birokrasi**

Lemhannas RI", dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2010; **ketiga**, "**strategi pencapaian nilai terbaik akuntabilitas kinerja**" pada tanggal 8 Juni 2010.

Reformasi birokrasi yang telah disampaikan oleh Lemhannas RI kepada Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi tanggal 22 Maret 2010 meliputi aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia.

Bagi Lemhannas reformasi birokrasi tersebut bukan hanya mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan produktif, akan tetapi harus mampu memosisikan Lemhannas RI sebagai "*driving force*" demokratisasi di Indonesia. Hal itu telah menjadi salah satu keputusan rapat pleno dewan pengarah tanggal 16 April 2010, yang dipimpin oleh gubernur Lemhannas selaku koordinator.

Landasan nilai-nilai demokrasi yaitu: **pertama**, sistem *check and balances*; **kedua**, eksistensi *good governance*; **ketiga**, kekuasaan kehakiman yang merdeka; **keempat**, promosi dan perlindungan HAM; **kelima**, Kebebasan mass media; **keenam**, eksistensi *civil society*; **ketujuh**, desentralisasi kewenangan; **kedelapan**, kontrol sipil terhadap militer; **kesembilan**, kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat; **kesepuluh**, supremasi hukum.

Hal tersebut sejalan dengan 11 prinsip pembaharuan Lemhannas RI, melalui pengukuhan dari pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI No. 67 Tanggal 13 Juni 2006. Oleh karena itu, nilai-nilai demokratisasi harus terus digelorakan dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di akhir sambutannya Wakil Gubernur Lemhannas RI menghimbau kepada seluruh keluarga besar Lemhannas RI agar berperan aktif untuk mensukseskan hari jadi ke-45 Lemhannas RI dengan penyelenggaraan berbagai acara diantaranya turnamen olah raga, kegiatan sosial, ziarah dan kegiatan ilmiah.



Penghormatan kepada Bendera Merah Putih yang dikibarkan dengan diiringi Lagu Indonesia Raya saat Upacara Bendera

KUNJUNGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO KE LEMHANNAS RI

Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. menerima kunjungan 32 (tigapuluh dua) mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang akan mengikuticeramah mengenai kepemimpinan dan sistem hukum pada tanggal 23 April 2010, di Ruang Rapat Nusantara I Gedung Tri Gatra Lemhannas RI.

Dalam ceramah tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan materi antara lain mengenai perbedaan antara seorang pemimpin dan manajer. Dijelaskan oleh Gubernur bahwa seorang pemimpin memiliki fokus ke orang dan dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) serta memiliki perspektif yang jauh ke depan, sedangkan manajer lebih fokus ke sistem dan bergantung pada sistem serta memiliki pandangan jangka pendek.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, model kepemimpinan strategis memiliki karakteristik sebagai berikut:

pertama, keterikatan pada tujuan yang pasti (*definite objective*);

kedua, kemampuan merumuskan inisiatif dan secara konsisten menjaganya;

ketiga, pertimbangan ekonomis dalam mendayagunakan segala sumber (*resources*);

keempat, kemampuan untuk mendayagunakan secara maksimal dan positif posisi strategis;

kelima, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak terduga;

keenam, Selalu berorientasi pada kemudahan dan kesederhanaan;

ketujuh, kemampuan untuk menyiapkan berbagai alternatif secara simultan (*multiple and simultaneous alternatives*);

kedelapan, kemampuan untuk melaku-



Suasana saat Gubernur Lemhannas RI Prof. DR Muladi S.H. memberikan kuliah kepada mahasiswa S3 Hukum dari Universitas Diponegoro, Semarang.

kan langkah-langkah yang tidak langsung (*indirect route*) untuk mencapai tujuan;

kesembilan, selalu mempertimbangkan saat yang tepat disertai dengan urutan program yang pasti;

kesepuluh, kemampuan untuk selalu memanfaatkan setiap keberhasilan;

keselabelas, cepat mengakui ide-ide yang baik dan berusaha menegakkan kejujuran intelektual.

Selain model kepemimpinan di atas, disampaikan juga model kepemimpinan heroik yang akan mampu menyemangati diri sendiri dan orang lain dengan ambisi-ambisi dan hasrat-hasrat heroik atau gagah berani untuk melakukan segala sesuatu secara tuntas dan prima.

Menurut Tim Lemhannas (2009), karakter *extraordinary* seorang negarawan harus memiliki moralitas individual, moralitas

sosial dan moralitas institusional serta moralitas global. Selanjutnya dirumuskan bahwa Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI) harus memenuhi 4 kriteria moralitas dan akuntabilitas sebagai berikut:

Pertama, moralitas dan akuntabilitas individual;

kedua, moralitas dan akuntabilitas sosial;

ketiga, moralitas dan akuntabilitas institusional; dan

keempat, moralitas dan akuntabilitas global.

Pada akhir acara sesi tanya jawab disimpulkan bahwa diperlukan negarawan yang memiliki karakter *leadership* dalam membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik.

ROMBONGAN MAHASISWA FISIP UNHAS DI LEMHANNAS RI



Sekretaris Utama Lemhannas RI, DR. Ardi Partadinata menerima kunjungan pimpinan rombongan dari perwakilan mahasiswa Fisip. Unhas Makassar di ruang kerja Sektama Lemhannas RI

Bagaimana sebenarnya posisi ketahanan nasional Indonesia dalam hubungannya dengan politik luar negeri. Mayjen TNI (Purn) Pandji Soesilo menjelaskan hal tersebut dalam kuliah kunjungan mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Hassanudin Makassar pada 29 April 2010 dalam rangka mata kuliah Teori dan Praktek Diplomas. Rombongan mahasiswa sebanyak 67 orang yang dipimpin oleh Drs. Patrice Lumumba, M.A. ini mendapat ceramah mengenai posisi strategis Indonesia dalam kuliah dan diskusi berjudul, **“Ketahanan Nasional Indonesia dalam Kaitan dengan Perjuangan Diplomas RI”**.

Percaturan dunia internasional yang muncul sesudah berakhirnya perang dingin ternyata tidak dengan sendirinya menciptakan hubungan Internasional yang serasi, harmonis, dan stabil dengan skala dan dimensi yang luas, baik pada tingkat global, regional maupun tingkat nasional. Persaingan dan sengketa antar negara dengan dalih berbagai motif tetap ada dan cenderung semakin tidak menentu dan penuh ketidakpastian. Trend perkembangan lingkungan strategis tersebut mutlak perlu diamati secara cermat dan terus-menerus karena langsung

akan berdampak positif maupun negatif terhadap peran dan kepentingan nasional suatu negara dalam hubungan Internasional yang pada hakikatnya tercermin dan tertuang dalam politik luar negerinya.

Dalam paparannya, Mayjen TNI (Purn) Pandji Soesilo menjelaskan tentang konsepsi Ketahanan Regional. Istilah ini dikenal sebagai *non power concept*, atau konsep non power yang berarti tidak menggunakan kekuatan fisik dalam berdiplomasi dengan negara lain. Konsepsi ini dikembangkan di lingkup ASEAN dan disepakati di dalam beberapa *Summit Asean*. Pada hakikatnya, konsepsi Ketahanan Regional merupakan bentuk manifestasi dari: **Pertama**, Ketahanan Nasional masing-masing negara anggota; **Kedua**, Derajat komitmen dari masing-masing negara anggota; **Ketiga**, Kadar kohesi antar negara anggota (*degree of cohesiveness*); **Keempat**, Daya adaptasi Asean terhadap kecepatan perkembangan lingkungan strategis.

Perkembangan diplomasi Indonesia, sangat dipengaruhi oleh kondisi strategis lingkungan, seperti perkembangan diplomasi pasca perang dingin yang menuntun Indonesia menganut politik Bebas Aktif. Perkembangan politik dunia berubah, perubahan itu pada gilirannya membawa Indonesia pada lingkungan dan konstelasi keamanan global baru, konstelasi yang tidak lagi mengacu pada *bipolarisasi* timur-barat seperti sebelumnya tetapi yang akan berbentuk lebih majemuk, lebih rumit dalam corak interaksi antara pusat kekuatan yang multi polar. Diplomasi Indonesia juga perlu mempertimbangkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi dominasi kepentingan ekonomi global, seperti besarnya kemungkinan China dan India dalam mendominasi perekonomian dunia. Bentuk diplomasi ini dapat berupa diplomasi total (*total diplomacy*), diplomasi perbatasan (*border diplomacy*), diplomasi tingkat tinggi (*summit diplomacy*), dan diplomasi kemanusiaan (*humanitarian diplomacy*).

Ceramah tersebut diakhiri dengan diskusi aktif antara pembicara dengan Mahasiswa Universitas Hasanudin, Selanjutnya sebelum meninggalkan Lemhannas RI pada pukul 11.30 WIB, rombongan Mahasiswa FISIP UNHAS melakukan photo bersama di Ruang Tri Gatra Lt. III Timur.



Karo Humas Brigjen TNI Kusworo membuka acara kunjungan mahasiswa FISIP UNHAS Makassar di Gedung Tri Gatra Lt. III Timur Lemhannas RI



Suasana di kelas saat para mahasiswa menerima ceramah dari Mayjen TNI (Purn) Pandji Soesilo sebagai narasumber

RAPAT KOPERASI PRIMER LEMHANNAS RI

Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke XIX Tahun buku 2009 Koperasi Primer Lemhannas RI dilaksanakan pada tanggal 27 April 2010 di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI.

Koperasi yang merupakan gerakan ekonomi rakyat, sebagai wadah kegiatan usaha bersama, berperan dalam meningkatkan efisiensi perekonomian anggotanya dan sekaligus turut memperbaiki kondisi kesejahteraan anggotanya dan koperasi primer Lemhannas RI dari tahun ke tahun mengalami perkembangan secara signifikan dan telah memberikan kontribusi positif kepada para anggotanya.

Dalam sambutan Sektama yang dibacakan oleh Karoum, menyampaikan harapannya agar Koperasi Primer Lemhannas RI terus membangun kemitraan dengan pihak lain dengan mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara pihak rekanan lembaga dengan Koperasi Primer Lemhannas RI guna pengembangan usaha mikro menjadi usaha menengah yang tangguh, sehingga dapat menambah modal usaha untuk perkembangan koperasi yang berdampak pada kesejahteraan anggotanya. Pada kesempatan tersebut beliau juga menyampaikan terima kasih kepada segenap pengurus Koperasi Primer Lemhannas RI yang telah bekerja secara konsekuen dan



Kepala Biro Uimum Settama Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. H. M. Said Saile M.Si membacakan sambutan pembukaan mewakili Sekretaris Utama Lemhannas RI

sungguh-sungguh yang bertujuan untuk pengembangan koperasi agar mampu berkoperasi secara benar dan meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi.

Laporan pertanggungjawaban tahun buku pengurus tersebut disampaikan kepada seluruh anggota dengan maksud untuk dijadikan bahan masukan pengurus dalam mengelola usaha, pencapaian tujuan, pengembangan usaha, pendapatan dan pentingnya peran koperasi peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Sebagai bahan dari pertanggungjawaban pengurus kepada anggota tahun buku 2009 juga disajikan secara lengkap dan terinci mengenai perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai selama 1 tahun selain laporan keuangan neraca per 31 desember 2009 berikut perhitungan Rugi/ Laba serta SHU yang telah dicapai. Dalam rencana kerja dan RAPB tahun buku 2010 koperasi telah mencapai target. Dengan rapat anggota tahunan Koperasi Primer Lemhannas RI tahun buku 2009, Koperasi Primer Lemhannas RI bisa lebih berperan memberikan kontribusi dalam perbaikan kesejahteraan anggota semuanya.



Ketua Koperasi Primer Lemhannas RI. Mayor Caj (K) Supiati saat melaporkan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota tahun buku 2009

Pengarah : DR. Ardi Partadinata, MH, M.Si.

Penanggung Jawab : Brigjen TNI Kusworo, **Redaktur :** Kolonel Ckm (K) Dr. Zawiah Ramlie, MH, M.Sc

Penyunting/Editor : Kolonel Caj. M. Sohib SM., Letkol Adm. Drs. M. Syahril, MM, Mayor Inf. Risnal SH. MA.

Redaktur Pelaksana : Linda Purnamasari., Endah Heliana, S.Sos., Trias Noverdi, S.S., R. Arief Ardiyanto, S.Sn

Desain Grafis & Fotografer : Arief Musadayan, Arianto, Bambang Iman Aryanto

Sekretariat : Syafrizal, Gatot

Alamat Redaksi : Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jak-Pus (10110)

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926